

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS SALAH SATU ALASAN PERCERAIAN KARENA PELANGGARAN PERJANJIAN PRANIKAH ANTARA PASANGAN YANG BERKEWARGANEGARAAN INDONESIA DAN ASING (Studi Kasus Putusan Nomor 340/Pdt.G/2017/PA.Amb)

**Oleh
FEIRA WAFI SAKINA**

Perjanjian pranikah merupakan perjanjian antara calon suami istri yang dibuat sebelum berlangsungnya perkawinan. Perjanjian pranikah itu sendiri diatur pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 139 sampai dengan Pasal 185 KUHPperdata. Namun, masih banyak pasangan yang keliru dalam membuat perjanjian perkawinan tersebut seperti pada putusan Nomor 340/Pdt.G/2017/PA.Amb. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk pelanggaran perjanjian perkawinan yang terdapat dalam putusan Nomor 340/Pdt.G/2017/PA.Amb, bagaimanakah dasar pertimbangan hakim memutuskan perkara Nomor 340/Pdt.G/2017/PA.Amb, dan akibat hukum yang timbul karena putusan Nomor 340/Pdt.G/2017/PA.Amb.

Metode penelitian dalam dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan asas-asas hukum. Data dan sumber data menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi pustaka dan studidokumen. Metode pengolahan data melalui pemeriksaan data, verifikasi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa Putusan Nomor 340/Pdt.G/2017/PA.Amb mengetahui bahwa perjanjian pranikah yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat melanggar syarat sah objektif perjanjian dalam Hukum Perdata, asas itikad baik dan asas keseimbangan dalam membuat perjanjian pada Hukum Perdata, pada Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan dalam pembuatan perjanjian perkawinan tidak diperkenankan untuk menyimpang dari aturan yang telah ada dan tata kesusilaan, namun perjanjian pranikah yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat menyimpang dari tata kesusilaan karena telah merugikan Penggugat sebagai seorang istri. Perjanjian pranikah tersebut juga melanggar peraturan pemberian nafkah lahir dan batin suami kepada istri

Feira Wafi Sakina

berdasarkan KUHPerdota dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena Tergugat selaku suami tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sebagai seorang istri. Tergugat juga melanggar asas monogami dalam KUHPerdota karena Tergugat melakukan perkawinan dengan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat bahwa Tergugat telah memiliki istri yang sah di Jepang. Berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat rukun kembali walaupun telah diusahakan, maka hakim mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yaitu istri dan akibat hukum dari putusan tersebut ialah perjanjian pranikah tersebut menjadi tidak berlaku dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menjadi putus, namun karena Penggugat tidak mengajukan gugatan harta bersama dan keduanya tidak memiliki anak, maka akibat hukum perceraian terhadap harta bersama dan hak asuh anak menjadi tidak berlaku.

Kata Kunci : Perjanjian, Perkawinan, Pranikah.

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS ONE OF THE REASONS OF DIVORCE DUE TO VIOLATION OF PRE-MARRIAGE AGREEMENTS BETWEEN INDONESIAN AND FOREIGN CITIZEN COUPLES (Case Study of Decision Number 340/Pdt.G/2017/PA.Amb)

By

FEIRA WAFI SAKINA

A prenuptial agreement is an agreement between a husband and wife made before the marriage takes place. The pre-nuptial agreement itself is regulated in Article 29 of Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage and Articles 139 to 185 of the Civil Code. However, there are still many couples who are wrong in making the marriage agreement as in the decision Number 340/Pdt.G/2017/PA.Amb. The problem in this study is how is the form of violation of the marriage agreement contained in the decision Number 340/Pdt.G/2017/PA.Amb, what is the basis for the judge's consideration in deciding case Number 340/Pdt.G/2017/PA.Amb, and what are the legal consequences arose because of the decision Number 340/Pdt.G/2017/PA.Amb.

The research method in this thesis uses a type of normative legal research with a descriptive research type. The problem approach uses a qualitative approach. Data and data sources use secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Methods of data collection by literature study and document study. Data processing methods through data checking, data verification, data classification, and data systematization. Data analysis using qualitative analysis.

The results of the study explain that Decision Number 340/Pdt.G/2017/PA.Amb knows that the prenuptial agreement made by the Plaintiff and the Defendant violates the objective legal requirements of the agreement in Civil Law, the principle of good faith and the principle of balance in making agreements in Civil Law, Article 29 of the Marriage Law explains that in making a marriage agreement it is not permissible to deviate from existing rules and the decency system, but the prenuptial agreement made by the Plaintiff and the Defendant deviates from the decency system because it has harmed the Plaintiff as a wife. The pre-nuptial agreement also violates the regulation on the provision of physical and

Feira Wafi Sakina

spiritual support for the husband to his wife based on the Civil Code and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage because the Defendant as the husband does not provide physical and spiritual support to the Plaintiff as a wife. The Defendant also violated the principle of monogamy in the Civil Code because the Defendant entered into a marriage with the Plaintiff without the Plaintiff's knowledge that the Defendant already had a legal wife in Japan. Based on Article 39 paragraph 2 of Law Number 1 of 1974 jis. Article 19 letter (f) Government Regulation Number 9 of 1975 and Article 116 letter (f) Compilation of Islamic Law because the Plaintiff and the

Defendant could not reconcile even though they had tried, the judge granted the divorce suit filed by the Plaintiff, namely his wife and the legal consequences of the decision The reason is that the pre-nuptial agreement is invalid and the marriage between the Plaintiff and the Defendant is broken, but because the Plaintiff did not file a joint property lawsuit and the two of them have no children, the legal consequences of divorce on joint property and child custody are invalid.

Keywords: Agreement, Marriage, Premarital.